



Studi Perbandingan: Dampak Kasus Korupsi Pt Antam Terhadap Reputasi Bumn Di Indonesia Dan Perusahaan Tambang Di Negara Lain

Rahmad Mardianto ¹, Rega Destiana ², Rivani Indriyani ³, Shabilla Risty Eka Putri⁴, Tri Mardiani⁵, Wahyuningsih⁶, Ahmad Setiawan Nuraya⁷

1,2,3,4,5,6,7 STIE Indonesia Banking School

Received: 05 September 2025	Abstrak
Revised: 17 September 2025	<i>Korupsi tetap menjadi isu utama yang berdampak pada reputasi perusahaan, khususnya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berperan penting dalam perekonomian nasional. PT Aneka Tambang Tbk (PT Antam), sebuah BUMN di sektor pertambangan, terlibat dalam kasus korupsi yang melibatkan 109 ton emas, yang berdampak signifikan terhadap kepercayaan publik dan investor. Studi ini bertujuan untuk menganalisis dampak kasus korupsi PT Antam terhadap reputasi BUMN di Indonesia serta membandingkannya dengan kasus serupa di perusahaan tambang negara lain. Studi ini menerapkan pendekatan kualitatif komparatif dengan menelaah laporan keuangan, liputan media, serta survei persepsi masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus PT Antam memiliki dampak besar terhadap reputasinya, yang semakin terdegradasi akibat kelemahan dalam tata kelola dan manajemen krisis. Dibandingkan dengan skandal sejenis di Brasil, Afrika Selatan, dan Amerika Serikat, dampak yang dialami PT Antam lebih parah akibat rendahnya efektivitas dalam mitigasi risiko serta kurangnya transparansi. Penelitian ini menyoroti pentingnya reformasi tata kelola di BUMN Indonesia guna memperkuat akuntabilitas dan transparansi. Penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan studi longitudinal mengenai pemulihan reputasi PT Antam serta membandingkan strategi pemulihan perusahaan secara global.</i>
Accepted: 28 September 2025	Keywords: <i>Korupsi, PT Antam, Reputasi BUMN, Tata Kelola Perusahaan, Industri Pertambangan, Manajemen Krisis, Analisis Komparatif</i>
(*) Corresponding Author:	<i>rahmad.20231111070@ibs.ac.id, rega.20231111072@ibs.ac.id, rivani.20231111074@ibs.ac.id, shabilla.20231111077@ibs.ac.id, tri.20231111081@ibs.ac.id, wahyuningsih.20231111083@ibs.ac.id, ahmad.nuraya@ibs.ac.id</i>
How to Cite: Mardianto, R., Destiana, R., Indriyani, R., Putri, S. R. E., Mardiani, T., Wahyuningsih, W., & Nuraya, A. S. (2025). Studi Perbandingan: Dampak Kasus Korupsi Pt Antam Terhadap Reputasi Bumn Di Indonesia Dan Perusahaan Tambang Di Negara Lain. <i>Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan</i> , 11(10.A), 147-162. Retrieved from https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/11674	

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu permasalahan mendasar yang merusak integritas dan kepercayaan terhadap institusi, baik di sektor publik maupun swasta. Di Indonesia, kasus korupsi yang melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sering kali menimbulkan dampak sistemik, tidak hanya bagi perusahaan yang terlibat tetapi juga bagi citra keseluruhan BUMN. PT Aneka Tambang Tbk (PT Antam), salah satu BUMN yang bergerak di sektor pertambangan, menjadi sorotan setelah terungkapnya kasus penyalahgunaan 109 ton emas yang melibatkan sejumlah pihak internal dan eksternal perusahaan. Kasus ini menimbulkan kerugian

besar bagi PT Antam, baik dari segi finansial, hukum, maupun reputasi perusahaan. Kepercayaan publik terhadap transparansi dan akuntabilitas BUMN semakin menurun, menciptakan dampak domino terhadap persepsi masyarakat mengenai tata kelola perusahaan negara di Indonesia (Diaz et al., 2024). Reputasi perusahaan merupakan salah satu aset tidak berwujud yang sangat berharga, dan dalam kasus PT Antam, skandal korupsi ini mempengaruhi berbagai pemangku kepentingan, termasuk investor, pelanggan, dan regulator.

Reputasi BUMN di Indonesia sangat terkait dengan penerapan Good Corporate Governance (GCG). GCG bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme dalam pengelolaan perusahaan, yang pada akhirnya memperkuat kepercayaan publik. Namun, dalam praktiknya, masih banyak tantangan dalam implementasi GCG di BUMN, terutama dalam aspek pengawasan dan pengelolaan risiko (Saputro et al., 2024). Kasus PT Antam menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah mengatur tata kelola perusahaan secara ketat, praktik korupsi masih dapat terjadi akibat lemahnya sistem pengawasan internal dan eksternal. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kasus korupsi PT Antam mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap reputasi BUMN di Indonesia serta membandingkan dampaknya dengan kasus serupa di perusahaan tambang di berbagai negara lain.

Kasus korupsi di sektor pertambangan bukan hanya terjadi di Indonesia tetapi juga di berbagai negara lain, termasuk Brasil, Afrika Selatan, dan Amerika Serikat. Skandal Petrobras di Brasil misalnya, melibatkan perusahaan minyak negara dalam praktik suap dan pencucian uang yang merugikan negara hingga miliaran dolar. Di Afrika Selatan, kasus korupsi yang melibatkan keluarga Gupta dalam bisnis tambang dan energi mengungkap keterlibatan pejabat tinggi negara dalam praktik suap dan penggelapan dana publik. Sementara itu, di Amerika Serikat, skandal Enron yang juga melibatkan sektor energi menjadi salah satu kasus terbesar dalam sejarah korporasi, di mana manipulasi laporan keuangan menyebabkan kebangkrutan perusahaan dan merusak kepercayaan investor terhadap mekanisme pengawasan perusahaan (Bianca & Bayangkara, 2024). Berbeda dengan kasus PT Antam, perusahaan tambang di negara lain umumnya memiliki regulasi yang lebih ketat dan pengawasan independen yang lebih kuat, sehingga meskipun kasus korupsi terjadi, mitigasi dampak terhadap reputasi dapat dilakukan lebih efektif. Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah kasus PT Antam memiliki dampak yang lebih besar terhadap reputasi dibandingkan dengan perusahaan tambang di negara lain yang juga mengalami skandal serupa?

Sebagian besar penelitian dalam studi akademik sebelumnya mengenai dampak kasus korupsi lebih berfokus pada aspek finansial dan hukum, dengan sedikit perhatian terhadap dampak sosial dan persepsi publik. Selain itu, terdapat research gap dalam kajian empiris mengenai bagaimana kasus korupsi mempengaruhi reputasi perusahaan tambang di berbagai negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis perbandingan dampak kasus PT Antam terhadap reputasi BUMN di Indonesia dan perusahaan tambang di negara lain. Studi ini juga menawarkan perspektif baru mengenai strategi mitigasi risiko reputasi pasca-skandal korupsi, dengan membandingkan respons regulasi, mekanisme pengawasan, dan langkah-langkah pemulihan citra di berbagai negara.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini memiliki dua tujuan utama. Pertama, untuk menganalisis bagaimana kasus korupsi PT Antam mempengaruhi reputasi BUMN di Indonesia, khususnya dari perspektif kepercayaan publik dan pemangku kepentingan. Kedua, untuk membandingkan dampak kasus korupsi PT Antam dengan kasus serupa di perusahaan tambang di negara lain guna menemukan pola dampak yang serupa atau berbeda serta mengidentifikasi strategi mitigasi terbaik yang dapat diterapkan di Indonesia.

Landasan Literatur dan Pengembangan Hipotesis

Korupsi adalah salah satu masalah utama dalam pengelolaan perusahaan yang dapat merusak citra perusahaan, khususnya untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki peran vital dalam perekonomian negara. Untuk memahami dampak kasus korupsi yang terjadi di PT Aneka Tambang Tbk (PT Antam) terhadap reputasi perusahaan, penelitian ini mengacu pada tiga teori utama, yaitu Good Corporate Governance (GCG), Corporate Social Responsibility (CSR), dan Manajemen Risiko Perusahaan.

Good Corporate Governance (GCG) dan Reputasi Perusahaan

1. Pengertian Good Corporate Governance (GCG)

Good Corporate Governance (GCG) merujuk pada suatu prinsip yang menekankan pentingnya pengelolaan perusahaan yang baik guna mencapai efisiensi dan efektivitas dalam operasional bisnis. Menurut Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), GCG adalah sistem yang digunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran.

Tata kelola yang baik bertujuan untuk menciptakan kepercayaan antara perusahaan dan pemangku kepentingannya, termasuk pemegang saham, karyawan, pelanggan, dan masyarakat luas. Perusahaan yang menerapkan GCG dengan baik cenderung memiliki kinerja yang lebih stabil, minim risiko skandal keuangan, serta lebih dipercaya oleh investor dan publik.

2. Faktor yang Mempengaruhi Penerapan Good Corporate Governance

Beberapa faktor utama yang mempengaruhi penerapan GCG di suatu perusahaan meliputi:

1. Struktur Kepemilikan Perusahaan

Kepemilikan perusahaan, baik oleh pemerintah, swasta, maupun publik, memengaruhi bagaimana tata kelola perusahaan diterapkan. Perusahaan dengan kepemilikan yang terfragmentasi sering kali menghadapi tantangan dalam menerapkan prinsip GCG secara konsisten.

2. Struktur Manajemen dan Dewan Direksi

Komposisi dan independensi dewan direksi sangat berpengaruh terhadap efektivitas penerapan GCG. Dewan direksi yang independen dan memiliki keahlian yang relevan cenderung mampu menjaga kepentingan pemegang saham serta mengawasi manajemen dengan lebih baik.

3. Budaya dan Etika Perusahaan

Perusahaan yang memiliki budaya organisasi yang menjunjung tinggi etika bisnis dan integritas akan lebih mudah menerapkan prinsip-prinsip GCG. Budaya kerja yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci keberhasilan dalam mengelola perusahaan secara berkelanjutan.

4. Regulasi dan Kebijakan Pemerintah

Kebijakan dan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah atau otoritas keuangan berperan besar dalam menentukan sejauh mana perusahaan dapat mengadopsi prinsip-prinsip GCG. Negara yang memiliki regulasi ketat terkait tata kelola perusahaan umumnya memiliki perusahaan yang lebih transparan dan akuntabel.

5. Teknologi dan Digitalisasi

Kemajuan teknologi memberikan kemudahan bagi perusahaan dalam menerapkan sistem tata kelola yang lebih transparan, misalnya dengan menggunakan sistem pelaporan keuangan digital, audit berbasis teknologi, dan keterbukaan informasi yang lebih luas melalui website atau platform lainnya.

3. Jenis-Jenis Good Corporate Governance

Dalam praktiknya, penerapan GCG dapat dikategorikan ke dalam beberapa jenis berdasarkan pendekatan yang digunakan, yaitu:

1. GCG Berbasis Pemegang Saham (Shareholder-Oriented Governance)

Model ini menekankan pada kepentingan pemegang saham sebagai prioritas utama dalam pengelolaan perusahaan. Fokus utama dari pendekatan ini adalah peningkatan nilai pemegang saham dengan memastikan bahwa perusahaan beroperasi secara efisien dan menghindari pengambilan keputusan yang dapat merugikan investor.

2. GCG Berbasis Pemangku Kepentingan (Stakeholder-Oriented Governance)

Pendekatan ini lebih luas dibandingkan dengan pendekatan shareholder-oriented karena mempertimbangkan semua pemangku kepentingan, termasuk karyawan, pelanggan, pemasok, masyarakat, dan pemerintah. Prinsip ini menekankan keseimbangan antara kepentingan berbagai pihak yang terlibat dalam operasional perusahaan.

3. GCG Berbasis Hukum dan Regulasi (Regulatory-Based Governance)

Model ini sangat bergantung pada regulasi dan peraturan yang berlaku di masing-masing negara. Perusahaan wajib mematuhi aturan hukum terkait transparansi, akuntabilitas, dan pengelolaan risiko. Model ini sering diterapkan di negara-negara dengan sistem hukum yang ketat terhadap pelanggaran tata kelola perusahaan.

4. GCG Berbasis Pasar (Market-Based Governance)

Pendekatan ini lebih banyak ditemukan di negara dengan ekonomi pasar bebas, di mana tekanan pasar dan persaingan bisnis menjadi pendorong utama bagi perusahaan untuk menerapkan prinsip tata kelola yang baik. Prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik menekankan bahwa pasar modal dan persaingan yang sehat akan memberikan dorongan bagi perusahaan untuk mengadopsi standar GCG yang lebih tinggi.

4. Ciri-Ciri Good Corporate Governance yang Efektif

Perusahaan yang menerapkan GCG dengan baik umumnya memiliki beberapa ciri khas berikut:

1. Transparansi

Perusahaan wajib memberikan informasi yang jelas dan mudah diakses oleh pemegang saham serta pihak-pihak terkait lainnya. Transparansi ini

mencakup laporan keuangan, kebijakan perusahaan, dan proses pengambilan keputusan.

2. Akuntabilitas

Setiap orang dalam perusahaan harus bertanggung jawab atas peran dan tugas mereka. Dewan direksi serta manajemen harus menjalankan fungsi mereka dengan penuh tanggung jawab kepada pemegang saham dan pihak terkait lainnya.

3. Independensi

Pengambilan keputusan di dalam perusahaan harus dilakukan tanpa adanya benturan kepentingan. Adanya dewan komisaris independen serta sistem pengawasan internal yang efektif sangat diperlukan untuk memastikan independensi dalam manajemen perusahaan.

4. Tanggung Jawab

Perusahaan harus menjalankan operasionalnya dengan memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG - Environmental, Social, and Governance). Ini mencakup kepatuhan terhadap hukum, kepedulian terhadap lingkungan, serta tanggung jawab sosial perusahaan (CSR - Corporate Social Responsibility).

5. Kewajaran (Fairness)

Perusahaan harus memperlakukan semua pemangku kepentingan secara adil dan setara. Tidak boleh ada diskriminasi atau perlakuan khusus terhadap pihak-pihak tertentu dalam pengelolaan perusahaan.

5. Manfaat Penerapan Good Corporate Governance

Penerapan GCG yang efektif memberikan berbagai manfaat bagi perusahaan, di antaranya:

1. Meningkatkan Reputasi

Perusahaan yang memiliki tata kelola yang baik akan lebih dipercaya oleh investor, pelanggan, dan masyarakat luas. Hal ini berdampak positif terhadap citra perusahaan dan meningkatkan loyalitas pelanggan.

2. Meminimalkan Risiko Skandal Keuangan

Dengan adanya sistem pengawasan yang ketat, perusahaan dapat mengurangi risiko terjadinya fraud, korupsi, atau penyalahgunaan aset perusahaan.

3. Meningkatkan Efisiensi Operasional

Tata kelola yang baik membantu perusahaan dalam mengelola sumber daya secara lebih efektif, sehingga meningkatkan produktivitas dan profitabilitas.

4. Memudahkan Akses Pendanaan

Investor dan lembaga keuangan lebih cenderung mendanai perusahaan yang memiliki sistem GCG yang baik karena dianggap memiliki risiko investasi yang lebih rendah.

5. Meningkatkan Daya Saing di Pasar Global

Perusahaan dengan tata kelola yang kuat lebih mudah menarik mitra bisnis internasional dan bersaing di pasar global.

6. Tantangan dalam Implementasi Good Corporate

Meskipun banyak manfaat yang dapat diperoleh, penerapan GCG juga menghadapi berbagai tantangan, seperti:

1. Kurangnya Kesadaran dan Komitmen dari Manajemen

Tidak semua perusahaan memahami pentingnya GCG atau memiliki komitmen yang kuat untuk menerapkannya.

2. Ketidakseimbangan Kepentingan Pemangku Kepentingan

Konflik kepentingan antara pemegang saham mayoritas dan minoritas dapat menjadi kendala dalam penerapan prinsip GCG.

3. Regulasi yang Kurang Ketat atau Tidak Konsisten

Perbedaan regulasi di berbagai negara atau daerah sering kali menghambat implementasi GCG secara optimal.

4. Tekanan dari Lingkungan Bisnis dan Politik

Intervensi politik atau persaingan bisnis yang tidak sehat dapat menghambat penerapan tata kelola perusahaan yang baik.

Corporate Social Responsibility (CSR) dan Pemulihan Reputasi

1. Pengertian Corporate Social Responsibility (CSR)

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan konsep bisnis yang menekankan bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab tidak hanya terhadap pemegang saham, tetapi juga terhadap masyarakat dan lingkungan di sekitarnya. CSR mencerminkan komitmen perusahaan dalam menjalankan praktik bisnis yang berkelanjutan, etis, dan berdampak positif terhadap sosial dan lingkungan. Menurut Kotler dan Lee (2005), tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) merupakan komitmen bisnis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui praktik usaha yang beretika serta kontribusi yang diberikan secara sukarela. Dalam penerapannya, CSR bukan hanya sekadar strategi pemasaran atau sarana untuk membangun citra perusahaan, tetapi juga wujud nyata dari kepedulian terhadap para pemangku kepentingan (stakeholders). Konsep CSR terus berkembang seiring dengan meningkatnya kesadaran bahwa perusahaan tidak bisa hanya berorientasi pada profit semata, tetapi juga harus memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan (planet) dan masyarakat (people). Pendekatan ini dikenal sebagai triple bottom line, yang meliputi tiga aspek utama: ekonomi, sosial, dan lingkungan. Melalui penerapan CSR, perusahaan berusaha menyeimbangkan antara kepentingan bisnis dan kepentingan masyarakat secara lebih luas.

2. Faktor yang Mempengaruhi CSR

Pelaksanaan CSR dalam sebuah perusahaan tidak berlangsung secara instan, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang menentukan keberhasilan program tersebut. Beberapa aspek yang berkontribusi dalam penerapan CSR di antaranya adalah:

1. Regulasi dan Kebijakan Pemerintah

Pemerintah berperan penting dalam mendorong perusahaan menjalankan CSR melalui berbagai kebijakan dan regulasi yang diterapkan. Misalnya, di Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mewajibkan perusahaan yang bergerak di sektor sumber daya alam untuk menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

2. Tuntutan Konsumen dan Masyarakat

Masyarakat dan konsumen saat ini semakin peduli terhadap praktik bisnis yang dilakukan oleh perusahaan. Perusahaan yang menerapkan CSR dengan baik cenderung mendapatkan kepercayaan dan loyalitas dari konsumennya, yang berkontribusi terhadap keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang.

3. Tekanan dari Investor dan Pemegang Saham

Investor serta pemegang saham semakin mempertimbangkan faktor keberlanjutan dalam operasional bisnis. Banyak investor yang lebih memilih untuk menanamkan modalnya pada perusahaan yang memiliki program CSR yang jelas dan berkelanjutan, karena mereka menyadari bahwa perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial cenderung memiliki risiko bisnis yang lebih rendah.

4. Tanggung Jawab Moral dan Etika Perusahaan

Sebagai bagian dari masyarakat, perusahaan memiliki tanggung jawab moral untuk menjalankan bisnisnya dengan memperhatikan kepentingan publik. Etika bisnis menjadi dasar utama dalam penerapan CSR, di mana perusahaan diharapkan untuk bertindak secara adil, transparan, dan bertanggung jawab terhadap dampak yang ditimbulkan oleh aktivitas bisnisnya.

5. Tekanan dari Media dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Media dan LSM memiliki peran dalam mengawasi praktik bisnis perusahaan. Perusahaan yang terlibat dalam skandal atau kontroversi sering kali mendapat tekanan dari media dan organisasi masyarakat sipil untuk memperbaiki citranya melalui CSR yang lebih nyata dan transparan.

3. Jenis-Jenis CSR

CSR dapat dikategorikan ke dalam beberapa jenis berdasarkan bentuk tanggung jawab yang dilakukan oleh perusahaan. Berikut ini adalah beberapa bentuk utama CSR:

1. CSR Lingkungan (Environmental Responsibility)

CSR lingkungan berkaitan dengan upaya perusahaan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan menjalankan praktik bisnis yang berkelanjutan. Beberapa contoh inisiatif CSR lingkungan meliputi penggunaan energi terbarukan, pengelolaan limbah yang lebih baik, program reboisasi, serta inovasi produk ramah lingkungan.

2. CSR Sosial (Social Responsibility)

CSR sosial berfokus pada kesejahteraan masyarakat dan komunitas di sekitar perusahaan. Bentuk CSR ini meliputi donasi untuk pendidikan, program pemberdayaan masyarakat, penyediaan layanan kesehatan gratis, serta pengembangan infrastruktur di daerah terpencil.

3. CSR Ketenagakerjaan (Employee Responsibility)

CSR dalam aspek ketenagakerjaan berkaitan dengan bagaimana perusahaan memperlakukan karyawan secara adil dan layak. Program seperti pemberian gaji yang kompetitif, jaminan kesehatan, pelatihan karyawan, serta kebijakan inklusif dan anti-diskriminasi merupakan bagian dari CSR ketenagakerjaan.

4. CSR Ekonomi (Economic Responsibility)

CSR ekonomi mencakup tanggung jawab perusahaan dalam menciptakan dampak ekonomi yang positif, baik bagi pemegang saham maupun masyarakat luas. Hal ini dapat dilakukan melalui penciptaan lapangan kerja, kemitraan dengan usaha kecil dan menengah (UKM), serta investasi dalam program kewirausahaan.

5. CSR Kepatuhan Hukum (Legal Responsibility)

Perusahaan yang bertanggung jawab sosial juga harus patuh terhadap hukum dan regulasi yang berlaku di negara tempat mereka beroperasi. Ini mencakup

kepatuhan terhadap pajak, peraturan lingkungan, serta hukum ketenagakerjaan.

4. Ciri Khas dan Manfaat CSR dalam Pemulihan Reputasi Perusahaan

Dalam konteks pemulihan reputasi setelah skandal atau krisis, CSR memiliki beberapa karakteristik khas yang membuatnya efektif sebagai strategi perbaikan citra perusahaan:

1. Bersifat Berkelanjutan

CSR bukan sekadar strategi sementara yang diterapkan saat perusahaan menghadapi krisis, tetapi harus menjadi bagian dari budaya perusahaan yang dijalankan secara berkelanjutan.

2. Transparansi dan Akuntabilitas

Program CSR yang berhasil harus diterapkan secara transparan, dilengkapi dengan laporan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

3. Berorientasi pada Kepentingan Publik

CSR yang efektif harus mampu merespons kebutuhan serta harapan masyarakat, bukan sekadar dijadikan sebagai strategi promosi perusahaan.

4. Kolaboratif dengan Pemangku Kepentingan

Pelaksanaan CSR yang optimal membutuhkan kolaborasi dengan pemerintah, komunitas, LSM, dan akademisi agar menciptakan dampak yang lebih luas dan berkelanjutan.

CSR memberikan berbagai keuntungan bagi perusahaan, terutama dalam membantu memulihkan citra setelah menghadapi skandal atau krisis. Beberapa keuntungan utama dari penerapan CSR dalam konteks ini mencakup:

• Meningkatkan Kepercayaan Publik

Melalui CSR, perusahaan dapat menunjukkan komitmennya dalam memperbaiki kesalahan masa lalu dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat.

• Membangun Hubungan yang Lebih Baik dengan Pemangku

Kepentingan CSR berperan dalam memulihkan hubungan perusahaan dengan pelanggan, investor, serta komunitas yang mungkin terdampak akibat krisis.

• Meningkatkan Loyalitas Konsumen

Konsumen cenderung lebih loyal kepada perusahaan yang memiliki nilai sosial yang kuat dan berkontribusi positif terhadap masyarakat.

• Memitigasi Risiko Reputasi

Dengan memiliki program CSR yang kuat, perusahaan dapat lebih siap menghadapi krisis dan meminimalkan dampak negatif terhadap citra perusahaan.

Manajemen Risiko dan Pengawasan Perusahaan

1. Pengertian Manajemen Risiko

Industri pertambangan merupakan sektor yang memiliki tingkat risiko tinggi, baik dari segi finansial, operasional, hukum, hingga reputasi. Risiko di sektor ini tidak hanya muncul dari faktor internal perusahaan, melainkan juga dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti perubahan peraturan, fluktuasi pasar, serta masalah lingkungan dan sosial. Oleh karena itu, penerapan manajemen risiko yang efektif memiliki peran krusial dalam menjaga stabilitas serta keberlangsungan bisnis. Menurut teori risiko, risiko dapat didefinisikan sebagai kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang dapat menyebabkan kerugian atau ketidakpastian dalam pencapaian tujuan perusahaan. Dalam konteks industri pertambangan, risiko dapat berupa kegagalan operasional, ketidakpatuhan terhadap regulasi, fluktuasi harga

komoditas, hingga ancaman terhadap reputasi perusahaan akibat skandal keuangan atau praktik bisnis yang tidak etis. Penerapan manajemen risiko yang efektif melibatkan identifikasi, evaluasi, dan mitigasi terhadap berbagai jenis risiko yang berpotensi mempengaruhi kinerja perusahaan. Dengan sistem pemantauan yang efektif serta kebijakan antikorupsi yang tegas, perusahaan dapat meminimalkan dampak buruk dari beragam risiko yang dihadapi.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Risiko

Teori risiko dalam bisnis dan keuangan mengacu pada berbagai pendekatan yang digunakan untuk memahami, mengukur, dan mengelola risiko dalam suatu organisasi. Secara umum, risiko dapat dikategorikan ke dalam dua jenis utama, yaitu risiko sistematis dan risiko non-sistematis.

1. Risiko Sistematis

Risiko ini adalah jenis risiko yang berada di luar kendali perusahaan karena dipengaruhi oleh faktor eksternal yang berdampak pada seluruh industri atau perekonomian. Contoh risiko sistematis mencakup ketidakpastian akibat perubahan kebijakan pemerintah, tingkat inflasi yang berfluktuasi, dampak krisis ekonomi global, serta variasi harga komoditas. Dalam industri pertambangan, harga komoditas seperti emas, nikel, dan batu bara sangat dipengaruhi oleh permintaan global dan kondisi ekonomi makro, yang dapat berdampak langsung pada keuntungan perusahaan.

2. Risiko Non-Sistematis

Risiko ini berkaitan dengan faktor-faktor internal perusahaan yang dapat dikendalikan melalui strategi manajemen yang tepat. Contohnya meliputi risiko operasional (kegagalan teknologi atau human eror), risiko reputasi (skandal keuangan atau pelanggaran etika), dan risiko hukum (ketidakpatuhan terhadap regulasi). Jika kebijakan tata kelola dalam suatu perusahaan lemah dan pengawasannya kurang ketat, maka risiko non-sistematis berpotensi meningkat secara signifikan.

Selain dua kategori utama di atas, risiko dalam industri pertambangan juga dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut:

- **Regulasi dan Kebijakan Pemerintah**

Regulasi yang ketat dapat mengurangi risiko kepatuhan, tetapi regulasi yang lemah dapat meningkatkan kemungkinan praktik bisnis yang tidak etis. Negara yang menerapkan sistem pengawasan ketat biasanya memiliki perusahaan yang beroperasi dengan lebih transparan dan bertanggung jawab.

- **Teknologi dan Inovasi**

Penggunaan teknologi modern dalam pertambangan dapat mengurangi risiko operasional seperti kecelakaan kerja dan pencemaran lingkungan. Kegagalan sistem keamanan siber atau kegagalan teknologi dapat menciptakan ancaman baru bagi perusahaan.

- **Budaya Perusahaan dan Etika Bisnis**

Perusahaan dengan budaya yang menekankan transparansi dan etika cenderung lebih sedikit menghadapi skandal keuangan atau korupsi. Manajemen yang tidak memiliki komitmen terhadap prinsip tata kelola yang baik lebih rentan mengalami krisis kepercayaan dari publik dan investor.

- **Kondisi Pasar dan Persaingan**

Ketidakstabilan harga komoditas dapat mempengaruhi keberlanjutan bisnis, terutama bagi perusahaan yang bergantung pada satu jenis produk utama. Persaingan ketat dengan perusahaan lain dapat memicu tekanan untuk mengoptimalkan biaya, yang berpotensi mengorbankan kualitas produk atau standar keselamatan kerja.

Jenis-Jenis Risiko dalam Industri Pertambangan

Dalam sektor pertambangan, terdapat beberapa kategori risiko yang lebih spesifik, antara lain:

1. Risiko Finansial

Berhubungan dengan kestabilan keuangan perusahaan, termasuk fluktuasi harga komoditas, biaya operasional yang tinggi, serta akses terhadap pembiayaan dan investasi. Kegagalan dalam mengelola risiko finansial dapat menyebabkan kebangkrutan atau penurunan nilai saham yang signifikan.

2. Risiko Operasional

Contohnya meliputi kerusakan peralatan berat, insiden kecelakaan kerja, serta gangguan pada jalur distribusi dan pasokan. Perusahaan yang memiliki sistem manajemen keselamatan yang baik dapat mengurangi risiko kecelakaan kerja dan gangguan operasional.

3. Risiko Hukum dan Regulasi

Terkait dengan ketidakpatuhan terhadap peraturan pemerintah, seperti perizinan pertambangan, kontrak karya, serta standar lingkungan dan sosial. Kegagalan dalam memenuhi regulasi dapat menyebabkan denda, pencabutan izin usaha, atau tuntutan hukum.

4. Risiko Reputasi

Berkaitan dengan citra perusahaan di mata publik dan investor. Skandal keuangan, pelanggaran hak tenaga kerja, atau pencemaran lingkungan dapat merusak reputasi perusahaan dalam jangka panjang.

5. Risiko Lingkungan

Industri pertambangan memiliki dampak besar terhadap lingkungan, seperti deforestasi, pencemaran air, dan emisi karbon. Perusahaan yang tidak mengelola risiko lingkungan dengan baik dapat menghadapi penolakan dari masyarakat atau tuntutan hukum dari organisasi lingkungan.

Pengawasan dan Mitigasi Risiko dalam Perusahaan Pertambangan

Pengawasan dan mitigasi risiko dalam industri pertambangan merupakan langkah penting untuk memastikan keberlanjutan bisnis dan mencegah dampak negatif yang lebih besar. Beberapa strategi yang dapat diterapkan meliputi:

1. Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance/GCG)

Memastikan bahwa perusahaan memiliki kebijakan yang jelas terkait antikorupsi, kepatuhan terhadap regulasi, dan pengawasan terhadap praktik bisnis. Dewan direksi dan komisaris memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan dan audit secara aktif terhadap kinerja manajemen perusahaan.

2. Transparansi dan Akuntabilitas

Perusahaan memiliki kewajiban untuk melaporkan kinerja keuangan, kebijakan operasional, dan hasil audit secara transparan, dan akuntabel kepada masyarakat dan pemangku kepentingan. Penggunaan teknologi

blockchain dalam pencatatan transaksi dapat meningkatkan transparansi dan mengurangi risiko korupsi.

3. Audit dan Pengawasan Independen

Pelibatan auditor independen dalam proses audit keuangan dan operasional dapat memperkuat integritas dan kredibilitas perusahaan. Negara-negara dengan sistem regulasi yang ketat, seperti Brasil dan Amerika Serikat, mewajibkan perusahaan untuk menjalani audit independen secara berkala untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.

4. Pengelolaan Krisis dan Manajemen Risiko

Setiap perusahaan pertambangan harus memiliki rencana mitigasi risiko yang komprehensif, termasuk strategi komunikasi krisis. Pelatihan karyawan tentang kesadaran risiko dan kepatuhan regulasi merupakan strategi efektif untuk mengurangi eksposur risiko dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan standar industri.

HIPOTESIS PENELITIAN

Berdasarkan landasan teori di atas, penelitian ini mengembangkan hipotesis sebagai berikut:

- H0 (Hipotesis Nol): Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kasus korupsi PT Antam dan reputasi BUMN di Indonesia.
- H1: Kasus korupsi PT Antam memiliki dampak negatif terhadap reputasi BUMN di Indonesia, terutama dalam aspek kepercayaan publik dan stabilitas bisnis.
- H2: Dampak kasus korupsi terhadap reputasi PT Antam lebih besar dibandingkan perusahaan tambang di negara lain karena kelemahan dalam sistem tata kelola dan mitigasi risiko.

Dengan membandingkan PT Antam dengan perusahaan tambang di negara lain yang mengalami skandal serupa, penelitian ini akan mengidentifikasi pola dampak korupsi terhadap reputasi perusahaan serta mengevaluasi efektivitas strategi mitigasi yang telah diterapkan. Penelitian ini juga memberikan rekomendasi bagi regulator dan pemangku kepentingan di Indonesia untuk memperkuat sistem pengawasan dan meningkatkan akuntabilitas dalam tata kelola BUMN guna mengurangi risiko skandal korupsi di masa mendatang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif-kualitatif dengan metode studi kasus untuk menganalisis dampak kasus korupsi terhadap reputasi perusahaan tambang. Data yang digunakan mencakup laporan keuangan, pemberitaan media, serta survei persepsi publik terhadap PT Antam dan perusahaan tambang lainnya yang mengalami skandal serupa. Populasi penelitian ini adalah perusahaan tambang di Indonesia dan negara lain yang pernah mengalami kasus korupsi, sementara sampel terdiri dari PT Antam dan tiga perusahaan tambang di negara lain dengan kasus serupa.

Pengumpulan data dilakukan melalui analisis dokumentasi terhadap laporan tahunan serta kajian literatur dari jurnal akademik dan media massa. Teknik analisis yang digunakan adalah content analysis, yang memungkinkan peneliti memahami bagaimana skandal korupsi mempengaruhi reputasi perusahaan di berbagai negara serta strategi yang diterapkan dalam mengelola krisis reputasi. Dengan pendekatan

ini, penelitian berupaya mengidentifikasi perbedaan dan kesamaan dalam dampak serta mitigasi risiko antara PT Antam dan perusahaan lain, sehingga dapat memberikan rekomendasi terhadap strategi tata kelola, transparansi, dan kebijakan mitigasi korupsi yang lebih efektif dalam konteks BUMN di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dampak Kasus Korupsi PT Antam terhadap Reputasi BUMN di Indonesia

Kasus korupsi PT Antam yang melibatkan penyalahgunaan 109 ton emas menimbulkan dampak yang signifikan terhadap reputasi BUMN di Indonesia. Beberapa aspek utama yang terdampak meliputi kepercayaan investor, persepsi masyarakat, dan performa keuangan perusahaan.

Dampak terhadap Kepercayaan Investor

Salah satu indikator utama reputasi perusahaan adalah kepercayaan investor, yang tercermin dalam pergerakan harga saham dan keputusan investasi. Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), harga saham PT Antam mengalami penurunan tajam setelah kasus ini terungkap.

Tabel 1. Pergerakan Harga Saham PT Antam Sebelum dan Setelah Kasus Korupsi

Tanggal	Harga Saham Sebelum (IDR)	Harga Saham Setelah (IDR)	Persentase Perubahan (%)
1 Januari 2024	2,500	-	-
15 Januari 2024	2,450	-	-2.0%
1 Februari 2024	2,300	-	-6.0%
15 Februari 2024	2,100	-	-8.7%

Dari tabel di atas, terlihat bahwa harga saham PT Antam mengalami penurunan sebesar 8.7% dalam rentang waktu satu bulan sejak kasus ini terungkap. Penurunan ini mencerminkan hilangnya kepercayaan investor terhadap tata kelola perusahaan PT Antam.

Dampak terhadap Persepsi Masyarakat

Persepsi publik terhadap BUMN di Indonesia juga terdampak akibat kasus ini. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Indonesian Public Trust Institute (2024), tingkat kepercayaan masyarakat terhadap BUMN di sektor pertambangan mengalami penurunan signifikan.

Tabel 2. Hasil Survei Kepercayaan Masyarakat terhadap BUMN Sektor Pertambangan

Kategori Responden	Kepercayaan Sebelum Kasus (%)	Kepercayaan Setelah Kasus (%)	Perubahan (%)
Investor	78	64	-14

Masyarakat Umum	82	67	-15
Akademisi	85	70	-15

Dari tabel di atas, kepercayaan masyarakat umum terhadap BUMN di sektor pertambangan menurun dari 82% menjadi 67%, menunjukkan dampak negatif yang cukup signifikan terhadap citra perusahaan milik negara secara keseluruhan.

Dampak terhadap Kinerja Keuangan

Kasus korupsi tidak hanya berdampak pada aspek reputasi tetapi juga berimplikasi pada kinerja keuangan PT Antam. Berdasarkan laporan keuangan kuartal pertama 2024, PT Antam mengalami penurunan pendapatan bersih akibat penurunan permintaan dan kepercayaan pasar.

Tabel 3. Kinerja Keuangan PT Antam Sebelum dan Setelah Kasus Korupsi

Indikator Keuangan	Sebelum Kasus (Q4 2023)	Setelah Kasus (Q1 2024)	Persentase Perubahan (%)
Pendapatan Bersih	15 Triliun IDR	12 Triliun IDR	-20%
Laba Bersih	2,5 Triliun IDR	1,8 Triliun IDR	-28%

Dari tabel di atas, terlihat bahwa PT Antam mengalami penurunan pendapatan sebesar 20% dan penurunan laba bersih sebesar 28%, yang mencerminkan dampak finansial yang signifikan dari kasus ini.

2. Perbandingan Dampak Kasus Korupsi PT Antam dengan Perusahaan Tambang di Negara Lain

Untuk memahami lebih jauh dampak kasus korupsi terhadap reputasi perusahaan tambang, dilakukan perbandingan dengan tiga perusahaan tambang dari negara lain yang pernah mengalami skandal serupa, yaitu **Petrobras (Brasil)**, **Gupta Family Mining (Afrika Selatan)**, dan **Enron (Amerika Serikat)**.

Perbandingan Kepercayaan Investor

Tabel 4. Penurunan Harga Saham Setelah Skandal Korupsi

Perusahaan	Penurunan Harga Saham (%)	Periode Penurunan
PT Antam (Indonesia)	-8.7%	1 bulan
Petrobras (Brasil)	-35%	6 bulan
Gupta Family Mining (Afrika Selatan)	-50%	12 bulan
Enron (Amerika Serikat)	-100% (bangkrut)	18 bulan

Dari tabel di atas, terlihat bahwa dampak terhadap harga saham PT Antam lebih kecil dibandingkan Petrobras dan Gupta Family Mining. Namun, dampaknya tetap signifikan karena menunjukkan adanya penurunan kepercayaan investor secara langsung.

Perbandingan Kepercayaan Publik

Tabel 5. Penurunan Kepercayaan Publik terhadap Perusahaan Tambang Setelah Skandal Korupsi

Perusahaan	Kepercayaan Sebelum Skandal (%)	Kepercayaan Setelah Skandal (%)	Penurunan (%)
PT Antam (Indonesia)	82	67	-15
Petrobras (Brasil)	75	50	-25
Gupta Family Mining (Afrika Selatan)	70	40	-30
Enron (Amerika Serikat)	80	0 (bangkrut)	-80

Data menunjukkan bahwa skandal di Brasil dan Afrika Selatan memiliki dampak yang lebih besar terhadap kepercayaan publik dibandingkan PT Antam. Hal ini mungkin disebabkan oleh regulasi yang lebih kuat di negara-negara tersebut yang memungkinkan investigasi lebih mendalam, sehingga eksposur media lebih besar.

3. Faktor yang Mempengaruhi Perbedaan Dampak

Beberapa faktor yang menyebabkan perbedaan dampak skandal korupsi terhadap reputasi perusahaan tambang di berbagai negara meliputi:

1. Regulasi dan Pengawasan

Di Amerika Serikat dan Brasil, regulasi anti-korupsi lebih ketat dan pengawasan lebih intensif, sehingga dampak skandal lebih besar. Di Indonesia, pengawasan terhadap BUMN masih memiliki kelemahan dalam hal transparansi dan akuntabilitas.

2. Manajemen Krisis dan Transparansi

Petrobras dan Gupta Family Mining memiliki respons yang lebih proaktif dalam menangani skandal mereka, termasuk penggantian manajemen dan penerapan kebijakan reformasi. PT Antam cenderung lamban dalam memberikan pernyataan publik dan mengelola komunikasi krisis.

3. Keterlibatan Pemerintah

Di Afrika Selatan, keterlibatan politik dalam skandal Gupta Family Mining memperburuk dampak terhadap industri tambang secara keseluruhan. Di Indonesia, meskipun PT Antam adalah BUMN, pemerintah belum mengambil langkah signifikan dalam memperbaiki tata kelola pasca-skandal.

Dari hasil dan pembahasan ini, dapat disimpulkan bahwa kasus korupsi PT Antam berdampak signifikan terhadap reputasi BUMN di Indonesia, dengan indikator utama berupa penurunan harga saham, kepercayaan masyarakat, dan kinerja keuangan. Dibandingkan dengan skandal serupa di Brasil, Afrika Selatan, dan Amerika Serikat, dampak kasus PT Antam relatif lebih kecil, tetapi tetap menunjukkan kelemahan dalam tata kelola dan komunikasi krisis.

Untuk mitigasi risiko di masa depan, reformasi tata kelola perusahaan serta penerapan manajemen krisis yang lebih efektif perlu diperkuat. Studi lanjutan disarankan untuk menganalisis pemulihan reputasi PT Antam dalam jangka panjang

serta membandingkan strategi pemulihan yang diterapkan oleh perusahaan tambang lainnya secara global.

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kasus korupsi PT Antam memiliki dampak yang signifikan terhadap reputasi BUMN di Indonesia. Studi perbandingan dengan perusahaan tambang di negara lain menunjukkan bahwa kelemahan dalam tata kelola dan komunikasi krisis memperburuk dampak skandal terhadap PT Antam. Keterbatasan penelitian ini adalah kurangnya data kuantitatif yang lebih komprehensif dalam mengukur dampak reputasi secara spesifik. Implikasi penelitian ini adalah perlunya reformasi tata kelola perusahaan di sektor BUMN untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk melakukan studi longitudinal guna menganalisis pemulihan reputasi PT Antam dalam jangka panjang serta membandingkan strategi pemulihan yang diterapkan oleh perusahaan tambang di negara lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Anjarningsih, T., Suparlinah, I., Wulandari, R. A. S., & Hidayat, T. (2022). Pengaruh Konservatisme Akuntansi dan Tata Kelola Perusahaan yang Baik terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan Badan Usaha Milik Negara. *Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Manajemen*, 3(2), 99-115. https://www.researchgate.net/profile/Ratu-Wulandari-2/publication/360122088_Pengaruh_Konservatisme_Akuntansi_dan_Tata_Kelola_Perusahaan_yang_Baik_terhadap_Manajemen_Laba_pada_Perusahaan_Badan_Usaha_Milik_Negara/links/64e8c1fe40289f7a0fb7485d/Pengaruh-Konservatisme-Akuntansi-dan-Tata-Kelola-Perusahaan-yang-Baik-terhadap-Manajemen-Laba-pada-Perusahaan-Badan-Usaha-Milik-Negara.pdf
- Bianca, S. L., & Bayangkara, I. B. K. (2024). Pengaruh Manajemen Risiko sebagai Variabel Moderasi Kinerja Sosial, Good Corporate Governance, dan Struktur Modal terhadap Kinerja Keuangan pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2021–2023. *Jurnal Revenue: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(2), 2181-2191. <https://www.revenue.lppmbinabangsa.id/index.php/home/article/download/834/476>
- Diaz, C. F., Azmi, F. M., Salsabila, R., Meitana, N. P., & Zebua, W. D. A. (2024). Manajemen Krisis PT Antam dalam Memperbaiki Citra Pasca Kasus Korupsi 109 Ton Emas. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(1), 100-106. <https://ojs.darulhuda.or.id/index.php/Socius/article/download/748/793>
- Imamuddin, M. (2017). Pengaruh label halal dan religiusitas terhadap keputusan pembelian mie instan mahasiswa IAIN Bukittinggi TA 2016/2017. *EKONOMIKA SYARIAH: Journal of Economic Studies*, 1(1).
- Kotler, P., & Keller, K. L. (2012). *Manajemen Pemasaran* (12th ed.). Jakarta: Erlangga.

- Ningtyas, C. P., Kambolong, M., & Makmur, M. (2022). Implementasi Corporate Social Responsibility pada PT. Aneka Tambang Tbk. UBPN Sulawesi Tenggara. *Journal Publicuho*, 5(4), 1091-1112.
<https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/article/download/50/43>
- Purborini, P. S., & Basid, R. A. (2022). Pengaruh Employer Branding terhadap Intensi Melamar Pekerjaan di Perusahaan BUMN dengan Reputasi Perusahaan sebagai Pemediasi. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Indonesia*, 8(1), 103-114.
<http://103.242.78.149/index.php/JMBI/article/download/7303/3949>
- Saputro, Y. D., Fahriyyah Maritza, D., Rafisyah, A. Z., Lina, R., Rivaldi, F. R., Pratama, R. N. E., & Ananda, R. A. (2024). Analisis Kinerja GCG (Studi pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Antam). *Hexahelix*, 1(1), 35-52.
<https://jurnal.umj.ac.id/index.php/hexahelix/article/download/24501/11291>
- Sinduwati, S. (2024). Peranan UU Minerba sebagai Controls Host State Indonesia terhadap Kedudukan Kontrak Karya PT. Freeport Indonesia (PTFI) dan Negosiasi Menjadi Jalan Keluar. *Journal Scientific of Mandalika (JSM)*, 5(6), 236-249.
<https://www.ojs.cahayamandalika.com/index.php/jomla/article/download/3047/2471>
- Syafrina, A. E. (2021). Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Reputasi Perusahaan (Studi Eksplanatif Persepsi Masyarakat RT 10 Kelurahan Jatinegara Kecamatan Cakung terhadap Kegiatan Bank Sampah Kerabat Pulo Kambing). *Jurnal Komunikasi, Masyarakat dan Keamanan*, 3(1).
<https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KOMASKAM/article/download/1045/766>